

**ANALISIS RESPON PETANI TERHADAP SOSIALISASI
RENCANA PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN
OLEH PT. KIRANA SEKERNAN DESA LUBUK RUSO KECAMATAN
PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI**

Fuad Muchlis, Yanuar Fitri dan A. Rahman

*Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan materi sosialisasi yang telah dilakukan oleh PT. Kirana Sekernan terhadap calon petani mitra, mendeskripsikan respon calon petani mitra atas sosialisasi yang telah dilakukan oleh PT. Kirana Sekernan dan mengungkapkan makna pola kemitraan yang ideal perspektif petani mitra (plasma) dalam rencana aktivitas bermitra dengan PT. Kirana Sekernan untuk pembangunan kelapa sawit di lokasi kajian. Desain penelitian ini menggunakan penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini ditempuh model dominant-*lest* dominan design, dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama (qualitative dominant) dan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan pendukung (quantitative- less dominant). Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan, Perusahaan telah melakukan sosialisasi kepada calon petani mitra di Desa Lubuk Ruso. Materi sosialisasi terkait dengan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit yaitu bentuk kongkrit pola kerja sama antara perusahaan dengan pemilik lahan, serta mencari kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Tahap awal sosialisasi yaitu tahun 2008 pola kemitraan yang ditawarkan kepada masyarakat melalui koperasi, dengan cara masyarakat menyerahkan lahan untuk dibangun kebun oleh perusahaan, dengan pola pembagian lahan 40 : 60 (40 % lahan untuk perkebunan inti dan 60 % untuk plasma). Pada tahun 2009 pola ini mengalami perubahan menjadi 50 : 50. Perubahan pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa melalui proses “dialog” bersama masyarakat menyebabkan respon calon petani mitra terhadap sosialisasi rencana pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. Kirana Sekernan menjadi negatif.

Kata kunci : respon, sosialisasi, kemitraan.

PENDAHULUAN

Izin lokasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan PT. Kirana Sekernan meliputi 3 kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari, yakni Kecamatan Pemayung, Muara Tembesi dan Batin XXIV. Desa yang termasuk dalam izin lokasi berjumlah 19 desa. Desa-desa tersebut adalah 9 desa di Kecamatan Pemayung yakni Desa Lubuk Ruso, Pulau Betung, Kaos, Pulau Raman, Olak Rambahan, Ture, Teluk Ketapang, Senaning, dan Kuap. Lima desa di Kecamatan Muara Tembesi yakni Desa Pulau, Tanjung Marwo, Empelu, Empelu Mudo dan Jebak, serta 5

desa di Kecamatan Batin XXIV yakni Simpang Karneo, Karneo, Koto Buayo, Mata Goal dan Hajran. Untuk merealisasikan rencana pembangunan perkebunan kebun kelapa sawit sangat ditentukan oleh ketersediaan lahan dan juga tenaga kerja. Dengan demikian data tentang jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk relevan diketahui untuk menentukan ketersediaan sumberdaya manusia dan penggunaan sumberdaya alam di suatu wilayah. Jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk dari ketiga Kecamatan tersebut dapat terlihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Pemayang, Muara Tembesi dan Batin XXIV Tahun 2008.

Kecamatan	Jml Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km ²)
Kec. Pemayang	27.886	957,50	29,10
Kec. Muara Tembesi	23.444	342,42	68,47
Kec. Batin XXIV	21.775	801,51	27,17

Sumber : Badan Pusat Statistik (2008)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk desa-desa dan kecamatan di wilayah rencana pembangunan perkebunan oleh PT. Kirana Sekernan bervariasi. Penduduk di Kecamatan Pemayang lebih jarang dibandingkan Kecamatan Muara Tembesi. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Pemayang jauh lebih luas yaitu 957,50 km² dengan kepadatan penduduk yang hanya 29,10 Jiwa/km² dibandingkan Kecamatan Muara Tembesi dan Batin XXIV. Secara umum dari segi kepadatan penduduk per km² dibandingkan dengan standar klasifikasi kepadatan penduduk menurut Biro Pusat Statistik masih tergolong jarang. Bila dihubungkan dengan rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Kirana Sekernan, maka dari data tersebut menunjukkan dua hal; yang pertama adalah bahwa masih banyak lahan yang bisa digarap oleh perusahaan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, terutama pada desa-desa yang wilayahnya luas dan kepadatan penduduknya jarang. Kedua adalah dalam operasional kebun nantinya akan banyak membutuhkan tenaga kerja, namun tenaga kerja yang berasal dari penduduk di sekitar lokasi mungkin tidak cukup dari sisi jumlah, sehingga mesti mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, yang mengakibatkan perubahan demografi, baik dari sisi struktur maupun proses demografi. Dalam konteks ini Kecamatan Pemayang memiliki potensi pengembangan areal kebun yang lebih luas dibandingkan dengan Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Batin XXIV.

Tingkat pendapatan masyarakat sangat tergantung dari kepemilikan perkebunan karet, baik dari sisi luas maupun kualitas kebun. Mereka yang memiliki kebun karet lebih luas dan atau kualitas pohon karet yang baik rata-rata memiliki penghasilan yang lebih besar dibanding yang tidak memiliki kebun. Karena dominannya sektor karet terhadap ekonomi masyarakat, maka tingkat pendapatan rumah tangga juga sangat tergantung dari harga karet. Hal tersebut nampak nyata dari pola konsumsi masyarakat sehari-hari, yang apabila harga karet tinggi cenderung berlaku konsumtif. Di samping dipengaruhi karet, dewasa ini pendapatan masyarakat juga tergantung dari luasan kebun kelapa sawit dan harga TBS. Dalam konteks keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, keberadaan PT. Kirana Sekernan akan menawarkan alternatif tambahan sumber pendapatan rumah tangga bagi masyarakat yang berasal dari lahan yang mungkin kurang mampu digarap oleh masyarakat sendiri, atau yang selama ini masih kurang produktif.

Hasil survey awal dengan mewawancarai *public relation* PT. Kirana Sekernan, aparat pemerintah dan tokoh masyarakat, dapat diketahui bahwa saat ini pihak perusahaan telah beberapa kali melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat yang akan bermitra dengan perusahaan. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman secara bersama bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit yang akan dilakukan betul-betul menghadirkan manfaat dan keuntungan serta tidak merugikan bagi kedua belah pihak, baik dari perusahaan (inti) maupun petani mitra (plasma).

Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi kepada calon petani mitra di lokasi kegiatan PT. Kirana Sekernan berharap bahwa keberadaannya untuk melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dengan petani dapat diterima. Keberadaan perkebunan kelapa sawit PT. Kirana Sekernan yang terlebih dahulu telah beroperasi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan berbatasan langsung dengan Kecamatan pemayang merupakan salah satu

contoh aktivitas perusahaan yang dapat dinilai oleh calon petani mitra (plasma).

Sosialisasi yang telah dilakukan sejatinya mampu memberikan pemahaman yang utuh bagi petani mitra (plasma) secara keseluruhan. Dengan demikian seluruh tahapan dan aktifitas setiap tahapan rencana pembangunan perkebunan yang akan digarap oleh PT. Kirana Sekernan harus diketahui petani mitra (plasma). Selain itu pihak perusahaan juga mesti membuka ruang aspirasi dimana petani mitra (plasma) berhak menyampaikan usulan, pendapat dan saran. Artinya rencana pembangunan kebun juga didasarkan atas kesadaran dan kesepakatan kolektif kedua belah pihak. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah preventif menghindari konflik antara perusahaan inti dan petani plasma sebagaimana sering muncul di tempat lain.

Dengan demikian, menurut peneliti menjadi relevan dan penting untuk melihat tanggapan atau respon sebagai bentuk penilaian dari calon petani mitra (plasma) untuk kemudian dianalisis dan mengidentifikasi pola kemitraan yang ideal perspektif petani mitra (plasma) atas sosialisasi rencana pembangunan kebun kelapa sawit ini.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini akan menggunakan penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Mengacu pada pernyataan Creswell (2002), ada tiga model yang dapat dipakai dalam penelitian kuantitatif-kualitatif yakni; (1) *two-phase design*; (2) *dominant-lest dominan design*; dan (3) *mixed methodology design*. Dalam penelitian ini ditempuh model *dominant-lest dominan design*, dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama (*qualitative dominant*) dan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan pendukung (*quantitative- less dominant*).

Data yang dikumpulkan dari penelitian terdiri dari 2 (dua) yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan tabulasi kemudian dianalisis secara deskriptif dan dianalisis

melalui skoring dan persentase. Skoring dilakukan untuk mengetahui gambaran respon petani mitra (plasma) terhadap sosialisasi rencana pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan PT. Kirana Sekernan (tujuan kedua).

Analisis kualitatif dilakukan untuk menjawab dan mempertajam tujuan satu sampai dengan tiga dalam kajian ini. Analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Di antaranya meliputi tiga jalur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum daerah penelitian

Desa Lubuk Ruso adalah salah satu desa di wilayah administratif Kecamatan Pemayang. Kecamatan Pemayang menjadi kecamatan definitif sejak tanggal 10 Januari 1992 berdasarkan PP No : 10 Tahun 1991 tanggal 22 Oktober 1991. Secara geografis Kecamatan Pemayang terletak di bagian timur Kabupaten Batang Hari yang meliputi wilayah seluas 957,50 Ha, dengan jumlah penduduk s/d Triwulan IV tahun 2008 sebanyak 28.362 jiwa (6.978 KK) yang terdiri terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Sementara Desa Lubuk Ruso sendiri memiliki luas lahan sebesar 210,01 atau 21,93% dari total luas wilayah Kecamatan Pemayang dengan jumlah penduduk 3.294 jiwa. Desa Lubuk Ruso memiliki lima Dusun, yaitu Dusun I, II, III, IV dan V dengan 10 Rukun Tetangga (RT).

Secara geografis Desa Lubuk Ruso sesungguhnya berada pada posisi yang menguntungkan karena warga desa tersebut dapat mengakses dan menggunakan fasilitas jalan raya yang relatif baik. Orbitasi Jarak Desa Lubuk Ruso juga berada pada posisi yang strategis karena memiliki daya jangkau terhadap pelayanan dari pemerintahan baik di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi yang relatif dekat seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Orbitasi Jarak dan Waktu Tempuh Desa Lubuk Ruso dari Pusat Pemerintahan

No	Orbitasi	Jarak	Waktu
1	Pusat pemerintahan kecamatan	5,5 km	10 menit
2	Pusat pemerintahan kabupaten	33,5 km	40 menit
3	Pusat pemerintahan provinsi	40 km	30 menit

Sumber : Badan Pusat Statistik (2008)

Secara umum keadaan topografi Desa Lubuk Ruso adalah dataran sedang yang memiliki iklim tropis dengan musim kemarau dan penghujan yang berimbang. Desa ini terletak persis di sepanjang aliran sungai Batang Hari. Dari keadaan morfologi, posisi desa yang berada di pinggir sungai mempunyai sedikit catatan. Pada masa lalu, sungai merupakan satu-satunya alur transportasi antar wilayah yang efektif. Situasi ini berperan mendukung aktivitas masyarakat pada saat itu baik secara ekonomi, sosial dan politik paling tidak sampai awal abad 20. Namun, semua ini berakhir pada dekade ke-20, ketika jalan darat telah banyak dibangun. Sejak awal abad ke-20, transportasi jalan darat merupakan sarana utama aktifitas ekonomi, sosial dan politik di daerah ini.

Penduduk Desa Lubuk Ruso secara umum, bekerja di sektor pertanian, yakni kebun atau ladang, peternakan dan perikanan. Dahulu ketika hutan masih banyak, beberapa warga juga bekerja di hutan, mengambil hasil hutan (kayu) dan menjadikannya bahan bangunan (papan dan tiang), tetapi sekarang karena jumlah hutan yang semakin terbatas ditambah dengan penertiban *illegal logging* yang cukup gencar akhir-akhir ini kegiatan ini semakin berkurang. Pekerjaan tersebut dilakukan menyesuaikan dengan kondisi alam dan musim. Artinya mereka akan terkonsentrasi melakukan pekerjaan tertentu ketika alam cocok dengan pilihan usaha mereka. Misalnya pada musim penghujan, umumnya mereka akan menanam padi, sementara pada musim kering mereka beralih ke palawija. Pada musim panen buah mereka fokus menunggu

dan mengumpulkan buah di kebun dan menjualnya kepada pedagang pengumpul atau dijajakan di pinggir jalan lintas dan meninggalkan untuk sementara aktifitas yang lain. Khusus untuk perkebunan, aktifitas menyadap karet dilakukan rutin setiap hari sedangkan pada kelapa sawit agak lebih longgar waktunya karena kegiatan panen dilakukan dua minggu sekali.

Materi sosialisasi pada rencana pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. Kirana Sekernan

Setiap perusahaan berkewajiban melakukan kegiatan sosialisasi sebelum memulai kegiatan pembangunan kelapa sawit pola kemitraan, begitu juga halnya dengan PT. Kirana Sekernan yang akan melakukan pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan. Sosialisasi merupakan kegiatan yang sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan pembangunan perkebunan. Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk pengenalan, agar setiap pihak yang terkait dengan perkebunan, terutama masyarakat di sekitar lokasi, khususnya masyarakat pemilik lahan bisa mengetahui dan memahami secara detil rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Kirana Sekernan.

Hasil wawancara dengan Humas PT. Kirana Sekernan terungkap bahwa pihak perusahaan telah menginformasikan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan kepada aparat pemerintahan daerah, desa, masyarakat pemilik lahan dan masyarakat yang berada disekitarnya. Disamping itu, perusahaan juga telah menyampaikan bentuk kongkrit pola kerja sama antara perusahaan dengan pemilik lahan, serta mencari kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara bertahap. Tahapan kegiatan sosialisasi dilakukan mulai dari pejabat pembina pembangunan perkebunan Kabupaten Batang Hari, Pejabat dan staf kecamatan di lokasi PT. Kirana Sekernan, serta aparat desa dan tokoh masyarakat lokasi izin usaha, kemudian masyarakat calon peserta kemitraan, dan juga masyarakat di desa sekitar izin lokasi.

Humas PT. Kirana Sekernan juga menjelaskan rencana perusahaan yang akan membangun kebun dengan pola kemitraan yang ditawarkan kepada masyarakat melalui koperasi, dengan cara masyarakat menyerahkan lahan untuk dibangun kebun oleh perusahaan, dengan pola pembagian lahan 40 : 60 (40 % lahan untuk perkebunan inti dan 60 % untuk plasma). Pada sosialisasi juga dijelaskan tentang status kepemilikan lahan apabila bersedia menjadi mitra perusahaan. Kemudian juga dijelaskan tentang skema kerjasama, pembiayaan pembangunan, pengelolaan, pembagian hasil dan pengembalian kebun, serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, juga pemutusan hubungan kerjasama, yang nantinya semuanya akan tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara PT. Kirana Sekernan dengan Koperasi yang akan dibentuk di wilayah perkebunan, yang akan ditandatangani oleh pihak PT. Kirana Sekernan dan Pengurus Koperasi, serta diketahui oleh Kepala Desa, Camat serta Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Perolehan lahan

Materi sosialisasi tentang perolehan lahan dijelaskan oleh perusahaan bahwa lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Kirana Sekernan merupakan Areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat yang umumnya belum memiliki sertifikat, tetapi memiliki bukti kepemilikan lahan dalam bentuk lain seperti Sporadik atau Surat Jual Beli. Sebagian wilayah izin lokasi adalah berupa pemukiman masyarakat, perkebunan masyarakat dan semak belukar.

Perolehan lahan merupakan kegiatan penentuan kepastian areal yang dapat dijadikan lokasi kebun, penyelesaian perjanjian penggunaan lahan, menyepakati perubahan pola kepemilikan. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan meliputi kegiatan survei dan inventarisasi lahan masyarakat dan desa, pengukuran lahan masyarakat yang dibuktikan dengan berita acara pengukuran, dan perjanjian pelepasan hak atas tanah untuk diikutsertakan ke dalam

pola kemitraan bagi petani yang berminat untuk ikut bergabung.

Pada kegiatan perolehan lahan ini masyarakat akan mengetahui status kepemilikan lahan dan luas lahan yang terpakai untuk perkebunan kelapa sawit. Pola kepemilikan yang awalnya bersifat hak milik menjadi hak milik koperasi sebagai kelembagaan petani peserta. Selanjutnya lahan inti akan dijadikan HGU atas nama perusahaan, sedangkan lahan plasma akan dijadikan HGU atas nama koperasi. Jangka waktu perjanjian dilaksanakan selama satu siklus tanaman dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pembentukan koperasi

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit pola kemitraan seperti halnya PT. Kirana Sekernan, keberadaan koperasi merupakan hal yang mutlak, karena koperasi merupakan wadah bagi petani pemilik lahan perkebunan dan sebagai mitra pemrakarsa. Oleh karena itu, pihak perusahaan bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan mendorong masyarakat petani pemilik lahan membentuk lembaga koperasi. Hal ini karena pihak perusahaan menginginkan koperasi yang mengelola kemitraan, adalah murni koperasi yang khusus bergerak di bidang tersebut. Saat sekarang sudah ada koperasi yang direncanakan akan mewadahi para petani plasma yakni Koperasi Pelayung yang didirikan pada tanggal 25 September 2008, dan sudah memperoleh Badan Hukum yakni No.12/BH/VI.5/2008.

Pembentukan koperasi sangat penting untuk wadah atau lembaga perwakilan petani pemilik lahan dalam pola kerjasama kemitraan dengan PT. Kirana Sekernan. Kegiatan kemitraan akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pihak pemrakarsa dengan koperasi yang mewakili anggota yang menyerahkan lahannya.

Pihak koperasi dan anggotanya (petani mitra) harus memahami sepenuhnya tentang butir-butir kesepakatan yang akan tertuang dalam perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani koperasi dengan PT. Kirana Sekernan.

Pembentukan koperasi tersebut tetap mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Setelah koperasi terbentuk, menjadi kewajiban bagi pihak perusahaan untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi, sehingga koperasi bisa memenuhi fungsi dan tugasnya untuk mensejahterakan anggotanya

Respon dan harapan pola kemitraan yang ideal (perspektif petani) di lokasi kajian

Menurut teori belajar behavioristik, respon adalah reaksi-reaksi dari seseorang akibat adanya rangsangan (stimulus) yang datangnya dari luar. Respon ada yang positif dan adapula yang negatif. Respon positif disebabkan oleh adanya ketepatan seseorang melakukan respons terhadap stimulus yang ada, dan tentunya yang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan yang negatif adalah apabila seseorang member reaksi justru sebaliknya dari apa yang diharapkan oleh pemberi rangsangan. Harey dalam Ahmadi (1991) menyatakan, respon positif adalah respon yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mayakini serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada. Sedangkan respon negatif ditunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak setuju terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

Respon dalam konteks penelitian ini diinterpretasikan sebagai kemampuan petani calon peserta kemitraan (plasma) menanggapi proses dan materi sosialisasi yang telah disampaikan oleh pihak perusahaan kepada calon petani mitra. Untuk melihat bagaimana respon dan harapan pola kemitraan yang ideal, peneliti menelusurinya dengan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat di Desa Lubuk Ruso, yaitu perangkat desa, PPL, tokoh adat, tokoh agama dan pemilik lahan.

Beragam informasi terungkap dari mereka tentang rencana pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan yang digagas PT. Kirana Sekernan. Awalnya petani menaruh harapan yang besar bisa memperbaiki kualitas hidupnya (lebih sejahtera) dengan bergabung menjadi peserta mitra pembangunan kebun kelapa sawit PT. Kirana Sekernan. Sosialisasi

yang disampaikan oleh pihak perusahaan pada awal tahun 2008 menyebutkan bahwa perusahaan menawarkan pola bagi lahan 40 : 60, dimana 40 % untuk lahan inti dan 60 % untuk lahan plasma/petani. Lahan inti akan dijadikan HGU atas nama PT. Kirana Sekernan, sedangkan lahan plasma/petani akan dijadikan SHM atas nama masing-masing petani pemilik lahan. Akan tetapi pada tahun 2009 pola yang ditawarkan ini tiba-tiba dirubah menjadi 50:50 secara sepihak oleh perusahaan tanpa melakukan proses “dialog” bersama pemilik lahan. Perubahan pola secara sepihak ini ternyata mempengaruhi perubahan respon pemilik lahan (petani) terhadap perusahaan. Beberapa petani sebagaimana menuturkan kepada peneliti menganggap bahwa perusahaan telah berlaku tidak konsisten dan terkesan kurang transparan kepada petani. Pola kemitraan awal dengan prosentase 40 : 60 yang telah disepakati dan ditindaklanjuti dengan proses selanjutnya yaitu penyerahan bukti kepemilikan lahan (seperti sporadik) untuk kemudian segera dilakukan pengolahan lahan dan penanaman, tiba-tiba petani pemilik lahan terkondisikan pada situasi dimana ia sulit menerima kemitraan dengan pola 50 : 50. Kondisi sulit ini dapat dijelaskan bahwa petani sulit untuk menarik diri dan membatalkan kemitraan karena bukti-bukti kepemilikan lahan telah diserahkan kepada perusahaan sementara jika menerima tawaran perusahaan ia merasa terbohongi karena tidak sesuai dengan sosialisasi awal yang disampaikan oleh perusahaan.

Dari perspektif perusahaan, pola 50 : 50 merupakan pola yang akan ditawarkan lagi kepada petani. Perusahaan menganggap bahwa angka 50 : 50 juga masih ideal mengingat perusahaan perkebunan di Jambi umumnya juga telah menyesuaikan dengan pola 50 : 50 ini.

Dalam paradigma baru komunikasi pembangunan, apa yang terjadi pada kasus di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan secara “setara” antara petani dan perusahaan sebagaimana definisi utama sebuah kemitraan belum maksimal terjadi karena belum ada ruang dialog diantara keduanya. Pendapatnya

Bakhtin dalam Rahim (2004) bisa menjelaskan tentang kualitas dialog. Menurutnya, semua komunikasi adalah monolog atau dialog. Komunikasi monolog tidak mengizinkan respon dan tidak ada apresiasi dari pendengar. Kondisi dimana petani tidak bisa memilih alternatif atau pilihan pola kemitraan menunjukkan komunikasi berlangsung secara monolog. Pengabaian pendapat atau usulan dari petani pemilik lahan oleh perusahaan menjadikan respon dari petani tidak akan muncul. Dialog sejatinya membutuhkan interaksi antara perusahaan dan petani secara setara sehingga kesadaran kritis yang diharapkan muncul dari proses dialog dapat terjadi. Dasar dari sebuah kemitraan idealnya adalah kerelaan secara ikhlas masyarakat atau petani calon peserta mitra, sehingga harus dipastikan ia bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

Lebih lanjut Freire (1984) memberi perhatian khusus pada signifikansi kesadaran kritis bagi pendidikan yang esensial. Freire menegaskan bahwa dialog merupakan keharusan bagi resolusi kontradiksi guru-murid. Melalui dialog dan komunikasi, murid dianggap bertanggung jawab dalam proses pembelajaran mereka sendiri, dan lalu menjadi *critical co investigators* dalam dialog dengan guru. Dalam konteks sosialisasi rencana pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. Kirana Sekernan seharusnya pihak perusahaan membuka ruang dialog sehingga komunikasi antara perusahaan dan petani tidak terkesan menggurui dan berlangsung setara. Esensi dari dialog adalah mengenal dan menghormati pembicara lain, atau suara lain, sebagai subjek yang otonom, tidak lagi hanya sebagai objek komunikasi. Dalam dialog partisipatif setiap orang memiliki hak yang sama untuk bicara atau untuk didengar, dan mengharap bahwa suaranya tidak akan ditekan oleh orang lain atau disatukan dengan suara orang lain.

Pasca perubahan pola dari 40 : 60 menjadi 50 : 50, sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak lagi dengan metode mengumpulkan orang di satu tempat seperti di balai desa sebagaimana dilakukan pada waktu sebelumnya. tapi dengan berkunjung dari

rumah ke rumah atau *door to door*. Dari sisi efektifitas, komunikasi dengan metode ini memang lebih efektif karena penjelasan bisa tersampaikan dengan detil kepada petani, akan tetapi akan lebih baik jika didahului dengan pertemuan kelompok, misalnya seluruh anggota petani mitra dikumpulkan pada saat sosialisasi dilakukan. Pada kondisi-kondisi tertentu, dalam forum berkelompok umumnya petani lebih mempunyai keberanian menyuarakan pendapatnya ketimbang sendiri-sendiri. Berkelompok juga memungkinkan terjadinya sharing informasi dan pendapat antar mereka dan akhirnya mereka dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran. Baru setelah itu dapat dilanjutkan dengan komunikasi secara interpersonal (*door to door*).

Pihak perusahaan juga mengakui bahwa cukup sulit untuk meyakinkan petani untuk mau bergabung pasca perubahan pola kemitraan. Oleh karenanya sebelum melakukan sosialisasi kepada petani, mereka terlebih dahulu memulai sosialisasi dari atas (*top down*), yaitu dari Dinas Perkebunan Kabupaten, Kecamatan dan aparat desa. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan mendapatkan dukungan sekaligus izin baru pasca perubahan pola kemitraan. Informasi dari perusahaan terungkap bahwa pihak kabupaten, kecamatan dan aparat desa tidak berkeberatan dengan perubahan pola yang ditawarkan oleh perusahaan. Apa yang menjadi kesepakatan antara pihak perusahaan dengan aparat terkait ternyata belum sejalan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat di lapangan. Hemat peneliti apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah pilihan yang kurang tepat. Sejatinya sosialisasi mesti dimulai dari *grass root* bukan sebaliknya. Mari kita tempatkan petani pemilik lahan sebagai orang yang paling berkepentingan dalam program ini. Pemerintah daerah dan aparat terkait cukup memposisikan diri sebagai fasilitator dan mediator antara petani pemilik lahan dan pihak perusahaan. Apapun pola yang akan diterapkan yang terpenting adalah bagaimana pola itu disepakati oleh kedua belah pihak dalam kondisi yang transparan, tidak ada

unsur paksaan dan dalam posisi yang setara serta petani mitra selalu memiliki peluang untuk menerima maupun menolak tawaran kemitraan yang diajukan oleh perusahaan.

Hasil penelusuran peneliti tentang rencana pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. Kirana Sekernan juga terungkap bahwa ternyata sebagian lahan yang akan dijadikan kebun pola kemitraan selain dimiliki oleh petani di Desa Lubuk Ruso, sebagian yang lain dimiliki oleh orang luar seperti dari Jambi. Umumnya petani dengan taraf hidup menengah ke bawah yang terkadang membutuhkan uang dalam waktu cepat kerap menjual lahannya kepada orang luar. Kondisi ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa proses-proses membangun “kesepakatan” antara petani dan pihak perusahaan belum terjadi secara utuh. Idealnya, pihak perusahaan selain berharap memperoleh lahan dari petani sebagaimana harapan dari sosialisasi yang telah dilakukan, juga memberikan penguatan-penguatan dan atau penyadaran kepada petani mitra akan pentingnya lahan bagi dirinya pada saat ini maupun masa mendatang.

Melihat pengalaman di daerah lain atau perusahaan lain, dimana muncul kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh ketimpangan ekonomi karena kebun yang dulu dijualnya dengan harga murah tetapi sekarang telah memberikan hasil yang menjanjikan. Apa yang terjadi di Desa Lubuk Ruso dan desa sekitarnya yang menjadi lokasi PT. Kirana Sekernan sesungguhnya bisa menjadi potensi konflik yang mengkhawatirkan jika tidak ada langkah-langkah antisipasi yang tepat. Potensi konflik disamping bisa merugikan pihak perusahaan karena bisa mengganggu aktifitas beroperasinya suatu perusahaan juga dapat merugikan warga, tidak saja pada aspek ekonomi tetapi juga modal-modal sosial yang selama ini menjadi karakter sekaligus kekayaan desa menjadi luntur.

Uraian di atas sebagai penjabaran atas pendapat masyarakat di lokasi kajian mengindikasikan bahwa respon petani atas rencana pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan dengan PT. Kirana Sekernan terutama pada pasca perubahan pola

40 : 60 menjadi 50 : 50 bernilai negatif. Pihak perusahaan idealnya bisa merancang ulang proses dan materi sosialisasi yang akan disampaikan kepada calon petani mitra, sehingga rencana pembangunan kebun pola kemitraan ini dapat berjalan semestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan, PT. Kirana Sekernan telah melakukan sosialisasi kepada calon petani mitra di Desa Lubuk Ruso. Materi sosialisasi terkait dengan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit yaitu bentuk kongkrit pola kerja sama antara perusahaan dengan pemilik lahan, serta mencari kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Tahap awal sosialisasi yaitu tahun 2008 pola kemitraan yang ditawarkan kepada masyarakat melalui koperasi, dengan cara masyarakat menyerahkan lahan untuk dibangun kebun oleh perusahaan, dengan pola pembagian lahan 40 : 60 (40 % lahan untuk perkebunan inti dan 60 % untuk plasma). Pada tahun 2009 pola ini mengalami perubahan menjadi 50 : 50.
2. Perubahan pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa melalui proses “dialog” bersama masyarakat menyebabkan respon calon petani mitra terhadap sosialisasi rencana pembangunan kebun kelapa sawit oleh PT. Kirana Sekernan menjadi negatif.

Saran

Bertolak dari uraian dalam pembahasan dan kesimpulan di atas, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya mengembangkan komunikasi yang *bottom up* dan partisipatif dalam setiap aktivitas pembangunan. Dalam konteks pembangunan kelapa sawit oleh PT. Kirana Sekernan, pemerintah dan aparaturnya terkait cukup memposisikan diri sebagai fasilitator

dan mediator antara petani pemilik lahan dan pihak perusahaan. Apapun pola yang akan diterapkan yang terpenting adalah bagaimana pola itu disepakati oleh kedua belah pihak dalam kondisi yang transparan, tidak ada unsur paksaan dan dalam posisi yang setara serta calon petani mitra selalu memiliki peluang untuk menerima maupun menolak tawaran kemitraan yang diajukan oleh perusahaan.

2. Pihak perusahaan idealnya bisa merancang ulang proses dan materi sosialisasi yang akan disampaikan kepada calon petani mitra, sehingga rencana pembangunan kebun pola kemitraan ini dapat berjalan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, H. Abu.1999. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta
Badan Pusat Statistik. 2008. Kabupaten Batang Hari Dalam Angka 2008.
Badan Pusat Statistik.2008 Kecamatan

Pemayung dalam Angka 2008
Creswell, J.W. 2002. Research Design Qualitative & Quantitatif Approaches. Terjemahan oleh Angkatan III & IV KIK UI. Jakarta : KIK UI Press.
Freire, P. 1984. Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan. DiIndonesiaikan oleh Alois A. Nugroho. Jakarta : PT. Gramedia.
Ragam Varian kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
Miles, M. B, Huberman AM. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
Rahim, S. A. 2004. Participatory Development Communication as a Dialogical Process dalam White, SA. 2004. Participatory Communication Working for Change and Development. New Delhi: Sage Publication India Pvt Ltd

